



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Februari 2017

Halaman: 4

## 2 Kecamatan Dinilai Rawan Konflik Pilkada

**YOGYA (MERAPI)** - Mendekati hari pemungutan suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan konflik menjadi kewaspadaan Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta. Terutama TPS yang berada di wilayah basis partai politik pendukung pasangan calon (paslon) Pilkada Yogyakarta.

"Kerawanan konflik memang ada di TPS yang wilayahnya basis pendukung. Ada juga TPS yang di wilayahnya terdapat tim sukses paslon yang berbeda," kata Komisiner Panwas Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Iwan Ferdian, Kamis (2/2).

Pada pemetaan pertama Panwas Kota Yogyakarta mencatat ada 81 TPS rawan konflik. Ada dua kecamatan yang dinilai cukup rawan konflik yakni Kecamatan Ngampilan dan Umbulharjo. Dia menyebutkan di wilayah Kecamatan Ngampilan misalnya yang menjadi basis salah satu partai politik. Sedangkan di Kecamatan

Umbulharjo ada beberapa TPS yang di dalamnya terdapat tim sukses kedua paslon di satu wilayah.

"TPS yang dekat dengan tempat tinggal paslon dan TPS yang pernah ada konflik pada pemilu sebelumnya juga masuk rawan konflik," ujarnya.

Pihaknya akan memaksimalkan pengawasan TPS dan relawan untuk memantau di TPS rawan konflik itu. Termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum kepolisian untuk mewaspadaai kerawanan konflik tersebut.

Panwas akan terus memperbarui kerawanan TPS itu mendekati hari-H. Peme-

taan juga menambahkan indikator pemilihan dari penyandang disabilitas. Pemilih dari penyandang disabilitas itu akan dimasukkan dalam kategori kerawanan akurasi daftar pemilih.

"Kami tambahkan indikator keberadaan pemilih dari penyandang disabilitas TPS sebagai faktor kerawanan karena pemilih ini membutuhkan perhatian khusus," tambah Iwan.

Jumlah pemilih penyandang disabilitas dari Daftar Pemilih Tetap Pilkada tercatat 837 pemilih. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta siap memberikan pelayanan kepada pemilih dari penyandang disabilitas. Tanpa mengarahkan memilih. "KPPS harus siap siapa yang bertugas mendampingi. Jangan saling lempar tanggung jawab. Kami minta KPU memberikan bimbingan teknis ke KPPS terkait pelayanan kepada pemilih disabilitas," tuturnya. (Tri)-d

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) |              |       |                 |

Yogyakarta, 01 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005